

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana
Hukum pada fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ABRIYANTO RICHO PERDANA PUTRA
NPM. 0871010008

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBAGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

FUNGSI SIDIK JARI PELAKUTINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

Disusun Oleh :

ABRIYANTO RICHO PERDANA PUTRA
NPM. 0871010008

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 1983031001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

Disusun Oleh :

ABRIYANTO RICHO PERDANA PUTRA

NPM. 0871010008

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tim Penguji :

1. Yana Indawati, SH., M.Kn (.....)
NPT.3 7901 07 0224

2. Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn (.....)
NPT. 3 7507 07 0225

3. Subani, S.H., M.Si. (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

Disusun Oleh :

ABRIYANTO RICHO PERDANA PUTRA

NPM. 0871010008

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur Pada tanggal 05 Juni 2013

Menyetujui,

Pembimbing :

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Yana Indawati, SH., M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

2.

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

3.

Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama: Abriyanto Richo Perdana Putra
Tempat/Tgl Lahir: Bangkalan /04 Oktober 1988 NPM
:0871010008 Konsentrasi :
Pidana Alamat : Prum Griya Abadi Blok AF.31 Bangkalan
(Madura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjana (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Surabaya, 05 Juni 2013
Penulis

Subani, SH., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Abriyanto Richo Perdana Putra
NPM. 0871010008

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan pujisyukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Penulis mengambil judul “FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO”

Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan untuk menambah wawasan, serta menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya dimasyarakat.

Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sekaligus sebagai dosen wali yang selama ini memberikan motivasi dan serta masukan-masukan yang sangat membangun.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS. selaku Wakil II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selaku

Dosen Pembimbing proposal skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun dalam penyusunan proposal ini.

5. Bapak AKP Idam, selaku tim Identifikasi di Polres Sidoarjo, yang selalu memberi arahan dan saran demi kelancaran penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Buat kedua Orang Tuaku, Suwoto dan Ibu Halimatus Sakdiyah yang selalu memberikan dorongan dan do’a sampai saya bisa mengenyam pendidikan tinggi.
9. Adik-adik ku Intan Novitasari Ditaloka dan Yurike Safitri Pitaloka, yang selalu memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa program studi ilmu hukum UPN Veteran Jatim, salah satunya Iwan Bugianto, Chandra Nandiwardhana, Akbar Eltoago, Irsan Alam, Agung, Ardan, Ihsan, Risky Ardrian, yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis.
11. Teman-teman tim Baros FC, Ahdan Dedik Irawan, Eko Edisusanto, Robby, Ardika Sanusi Hasan, Rosi, Aji, Risal, Inul, nyonyo, Gafin, Andi, Soleh, Candra, terimakasih atas doanya, dan motifasinya.
12. Indah Permatasari tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan material maupun spiritual dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari daalam penulisan proposal ini masih terdapat banyak kekurangannya untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya,05 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Tujuan Umum Tentang Hukum Pidana	5
1.5.1.1 Pengertian Pidana	5
1.5.1.2 Jenis-Jenis Pidana	5
1.5.1.3 Jenis-Jenis Pidana Pokok	7
1.5.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
1.5.1.5 Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritisi	14

1.5.1.6	Cara Merumuskan Tindak Pidana	16
1.5.1.7	Sidik Jari Sebagai Salah Satu Barang Bukti Dalam Suatu Tindak Pidana.....	20
1.5.2	Tinjauan Tentang Sidik Jari	25
1.5.2.1	Awal Terbentuknya Sidik jari	25
1.5.2.2	Awal Penggunaan Sidik Jari	26
1.5.2.3	Pengertian Sidik Jari	28
1.5.2.4	Jenis-Jenis Sidik Jari	29
1.5.3	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
1.5.3.1	Pengertian Pembunuhan.....	37
1.5.3.2	Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja.....	38
1.5.3.3	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	42
1.5.3.4	Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana	44
1.6	Metode Penelitian	47
1.6.1	Pendekatan Masalah	47
1.6.2	Sumber Data Atau Bahan Hukum	47
1.6.3	Bahan Hukum Primer	48
1.6.4	Bahan Hukum Sekunder.....	48
1.6.5	Bahan Hukum Tersier	48
1.6.6	Pengumpulan Data	48
1.6.7	Teknis Analisa Data.....	50
1.7	Sistematika Penulisan.....	50

BAB II DASAR DIPAKAINYA SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI UTAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOAJO.....	52
2.1 Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Resort Sidoarjo.....	52
2.2 Dasar Penyidik Di Kepolisian Resort Sidoarjo Yang Menjadikan Sidik Jari Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alat Bukti Utama.....	57
BAB III MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA.....	60
3.1 Fktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Resort Sidoarjo.....	60
3.2 Upaya-Upaya Penanggulangan Penghambat Pelaksanaan Sidik Jari DalamTindak Pidana Pembunuhana Berencana.....	64
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Jenis Sidik Jari Berpola Arch	30
Gambar 1.2: Jenis Sidik Jari Berpola Loop	31
Gambar 1.3: Jenis Sidik Jari Berpola Whorl	31
Gambar 2.1 Rumus Sidik Jari Tersangka	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Data Korban Pembunuhan Biasa Maupun Berencana Di Polres Sidoarjo	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian dari Polres Sidoarjo

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Hasil Wawancara di Polres Sidoarjo

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembunuhan Berencana

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Abriyanto Richo Perdana Putra

NPM : 0871010008

Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 04 Oktober 1988

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui data primer. yaitu data bersumber dari literature-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa deskriptif..

Polisi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, untuk mencari siapa pelakunya, polisi menjadikan sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap atau mencari siapa pelakunya. Karena sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana.

Didalam pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan mengalami kendala-kendala di tempat kejadian perkara (TKP), namun kepolisian dapat menanggulangi faktor kendala tersebut, diantaranya menambahkan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung proses pelaksanaan pengambilan sidik jari, memperhatikan peningkatan kinerja kepolisian dalam melakukan identifikasi.

Identifikasi sidik jari dikenal dengan daktiloskopi adalah ilmu mempelajari sidik jari dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan jari kaki dan tangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana pelaksanaan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana di polres Sidoarjo.

Hasil kesimpulan diperoleh bahwa, didunia tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama sehingga pihak kepolisian tidak akan pernah dikelabui oleh sidik jari.

Kata Kunci:Penyidikan, Pembunuhan, Sidik Jari

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman maka kejahatan turut berkembang pula. Dengan berkembangnya kejahatan ini lah yang membuat resah masyarakat akan keselamatan dirinya. Kejahatan yang terjadi dalam negara ini semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui.

Penyidikan merupakan salah satu upaya kepolisian untuk membuat terang segala permasalahan yang di hadapinya. Meskipun dalam faktanya banyak suatu kejahatan yang mempergunakan cara yg tidak wajar, seperti pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, pelaku dengan sengaja memotong-motong bagian tubuh dan bagian tubuh yang terpotong di buang di beda-beda tempat agar Polisi tidak bisa atau kesulitan untuk memeriksa jasad tersebut. Dan banyak cara lain seperti membakar tubuh manusia dll.

Namun cara seperti itu meski dalam kaitannya sangat sadis dan susah untuk diterima dengan akal sehat, namun Polri sendiri masih bisa mengatasinya dan melakukan suatu penyidikan meski pelakunya belum ditemukan, yaitu menggunakan penyidikan dengan cara sidik jari pelaku kejahatan yang di atur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf F mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang mana dalam

melancarkan aksi jahatnya pelaku pasti meninggalkan sidik jarinya di sekitar tempat perkara. Dalam menangani segala kejahatan yang terjadi proses penyidikan sidik jari bisa dilakukan, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang lainnya. Sidik jari merupakan penyidikan awal untuk membuat terang suatu kasus dan sesegera mungkin untuk menemukan pelakunya.

Identifikasi sidik jari, dikenal dengan daktiloskopi adalah [ilmu](#) yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari [bahasa Yunani](#) yaitu dactylos yang berarti jari jemari atau garis jari, dan scopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, dactyloscopy yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.¹

Sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. sehingga rumusan sidik jari yang ada di jari-jari manusia sangat-sangat membantu kepolisian dalam pengungkapan tersangka atau pelakunya dan segera mungkin pelaku bisa ditangkap.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti Bagaimana Pelaksanaan Sidik Jari Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

¹Marzuki Yahya, Teknik Membaca Garis Tangan dan Sidik Jari, http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari#Sidik_jari_untuk_identifikasi, Diakses pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, 19:15 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan Proposal ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar dipakainya sidik jari sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana di kepolisian resort Sidoarjo?
2. Factor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan berencana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana pelaksanaan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari baik pada tersangka maupun pada barang-barang yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP atau sidik jari yang menempel maupun tertinggal di TKP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

b) Bagi Masyarakat.

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tujuan Umum Tentang Hukum

1.5.1.1 Pengertian Pidana

Stelsel pidana merupakan dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidan, cara di mana menjalankannya, begitun juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengeculikan penjatuhan pidana. Di samping itu, hukum penitensier juga berisi tentang system tindakan (maatregel stelsel). Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif di samping diberi hak dan kekuatan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (maatregelen).

Pidan lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

1.5.1.2 Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43,

yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.²

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;

² Drs. Adami Chazawi, S.H, Pelajaran Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. H. 23-25.

3. Pidana pengumuman keputusan hakim.³

1.5.1.3 Jenis-Jenis Pidana pokok

a. Pidana Mati

Baik berdasarkan kepada Pasal 69 maupun berdasarkan kepada hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya. Meskipun perbaikan atas terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.⁴

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang

³ Ibid h. 26.

⁴ Ibid h. 29.

dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,11 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat, misalnya: 140 (3), 340;
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/factor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2);
- 4) kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).⁵

b. Pidana penjara

Stelsel pidana penjara, Pasal 12 (1), dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat 4, 368 ayat 2; dan
- 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara

⁵ Ibid h. 31.

sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106, 108 (2).

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3, yakni sebagai berikut.

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih: (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang terancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (106, 108 (2))
- 2) Dalam hal telah terjadinya: perbarengan, atau (2) pengulangan atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti Pasal 338, 365 ayat 3, 140 ayat 1.⁶

Menurut Pasal 13 KUHP, narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kependidikan, yaitu sebagai berikut.

⁶ Ibid h. 34.

- 1) Kelas I, yaitu bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
- 2) Kelas II, yaitu:
 - a) Bagi narapidana penjara yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut di atas;
 - b) Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - c) Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dari kelas III.
- 3) Narapidana kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain. Menurut Pasal 55 peraturan kepenjaraan, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (15) apabila ia telah menyambangi pidana sepertiganya paling sedikit 9 bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
- 4) Kelas IV, yaitu bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi 3 bulan.⁷

c. Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum

⁷ Ibid h. 37.

umum penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieeksekusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.⁸

d. Pidana Denda

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam

⁸ Ibid h. 39.

kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal melaksanakan pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum 1 hari dan maksimal umum 6 bulan.
- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah 3 rupiah tujuh puluh lima

sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dengan pidana pokok.⁹

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim oleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 tahun 1948 tersebut, dapat diketahui narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang dilakukannya itu merupakan

⁹ Ibid h. 40-41.

tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁰

1.5.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1.5.1.5 Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagai mana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R Tresna, Vos, jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari menurut rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (menulis);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

¹⁰ Ibid h. 42-43.

- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu suatu perbuatan/tindakan setiap seseorang yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan kesalahan atau dipersalahkan dan diancam dengan pidana atau hukuman yang berlaku.

1.5.1.6 Cara Merumuskan Tindak Pidana

¹¹ Ibid h. 79-81.

Dalam hal ini akan dilihat akan dilihat dari tiga dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP kita.

1. Cara Pencantuman Unsur-unsur Dalam Kualitas Tindak Pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya ada tiga cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
- b. Dengan mencantumkan semua unsure pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana;
- c. Sekadar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsure-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.¹²

2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Di samping itu, dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

a. Dengan Cara Formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pada Pasal 362,

¹² Ibid h. 116.

jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika perbuatan membuat palsu (surat) dan memalsu (surat) selesai dilakukan, kejahatan itu selesai (263).

b. Dengan Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidaklah menjadi soal, apakah dengan menembak, meracun, dan sebagainya.¹³

2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrifven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III;

¹³ Ibid h. 119.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delictem*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*cilpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindakan pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjeknya hukumnya, dapat dibedakan antara tindakan pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal tertentu, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacbt delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sedut beberapakali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delictem*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);¹⁴

3 Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Dalam praktik hukum pidana perihal waktu dan tempat tindak pidana, juga penting bagi tersangka atau

¹⁴ Ibid h. 121-122.

terdakwa dan penasehat hukumnya dalam hal menyiapkan dan atau melakukan pembelaannya dengan sebaik-baiknya, khususnya mengenai alibi.¹⁵

1.5.1.7 Sidik Jari Sebagai Salah Satu Barang Bukti Dalam Suatu Tindak Pidana

Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas (police line) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Begitupun tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan jejak atau alur kulit yang ditemukan pada telapak tangan dan bagian pelantar.

Istilah sidik jari mengacu pada ibu jari, telapak dan jari kaki. Ketika diperiksa oleh ahli sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat berharga. Identifikasi sidik jari pertama kali ditemukan pada tahun 1982 di Buenos Aires oleh Juan Vucatic, hal ini disebabkan adanya kasus pembunuhan terhadap dua orang anak laki-laki Fransesca Rojas, dimana dia

¹⁵ Ibid h. 136

menuduh tetangganya telah membunuh kedua anaknya. Sidik jari yang mengandung bercak darah ditemukan pada pintu dekat dengan lokasi korban ditemukan. Pintu tersebut kemudian dilepas dan dibawa kepusat identifikasi bersama dengan sidik jari tersangka dan Rojas. Sidik jari Rojas diperiksa dan dia mengaku telah membunuh kedua anaknya.

Sidik jari laten adalah jejak yang tertinggal akibat menempelnya alur jari. Sidik jari laten harus dimunculkan sebelum dapat dilihat dengan kasat mata. Sideik jari mempunyai beberapa jenis, yaitu:¹⁶

- a) sidik jari yang terlihat, seperti pada debu, lumpur, darah, minyak atau permukaan yang kiontras dengan latar belakangnya;
- b) sidik jari laten, tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk atau alat pohylight;
- c) sidik jari cetak, pada permukaan yang lembut seperti lilin, purtty;
- d) sidik jari etched, pada logam yang halus disebabkan oleh asam yang ada dalam kulit.

Sidik jari banyak ditemukan dalam tempat kejadian perkara dan sangat amat mudah rapuh jika tidak dijaga dan

¹⁶ Adam Projodikoro, Kriminalitstik dan Penyidikan Secara Ilmiah, <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/slhukum09/205711025/bab3.pdf>, diakses tanggal 13 Januari 2013, jam 08.30 wib.

ditangani dengan baik. Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari maka seringkali digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi pollilight.

Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Lamanya sidik jari tergantung pada beberapa faktor yaitu:

- a) komposisi sidik jari laten;
- b) bahan yang terkandung didalamnya;
- c) kondisi lingkungan;
- d) bahan yang melekat pada sidik jari;
- e) posisi sidik jari laten;
- f) lamanya waktu antara terbuktinya sidik jari dengan pemeriksaan.

Pada sidik jari laten untuk dapat melakukan identifikasi harus dimunculkan terlebih dahulu dengan serbuk warna (untuk benda menyerap atau tidak menyerap) tehnik pencahayaan (non desruktif), pollylight atau cyanoacrylate (super glue untuk benda yang tidak menyerap), hal ini dikarenakan sifatnya rapuh, sehingga dalam melakukan identifikasi seseorang penyidik harus memakai sarung tangan untuk mencegah tercampurnya sidik jari penyidik dengan tersangka. Dalam identifikasi sidik jari laten

perlu disadari didalam kemungkinan letak sidik jari tersebut, apabila diduga sidik jari laten terdapat pada permukaan gelas maka harus dipegang dengan sangat hati-hati.

Dalam praktek identifikasi sidik jari, terkadang pelaku berusaha menghilangkan keasliannya sidik jarinya dengan cara merusak susunan kulit ari pada jari-jari tangan (khususnya). Namun alur kulit pada sidik jari tangan tidak mudah untuk dihilangkan atau diubah, hal ini dikarenakan alur kulit berkembang selama masa fletus (10-20 minggu) dan tidak berubah sampai proses pembusukan. Ciri-ciri alur kulit tidak berulang pada bagian manapun pada orang yang sama atau orang lain, ciri alur kulit akan berubah jika terkena suatu penyakit. Meskipun pola alur kulit beragam namun dapat diidentifikasi.

Sidik jari dapat diklasifikasikan dengan mudah, hal ini dikarenakan sidik jari dimiliki oleh setiap manusia dan disukai oleh setiap manusia hal ini terbukti dengan adanya sidik jari pada gua-gua purba, sidik jari dalam segel lilin, kramik dari tanah liat (seperti) di Cina dan Jepang.

Sir Edward Henry pada akhir abad 19 menciptakan sistem klasifikasi sidik jari dan sistem ini dipergunakan diseluruh dunia. Sistem klasifikasi sidik jari didasarkan pada penerapan nilai secara numerik terhadap berbagai pola, dikombinasikan dengan perhitungan alur kulit dan jejaknya. Seiring dengan perkembangan zaman maka untuk mempermudah melakukan klasifikasi sidik jari teknologi telah menghasilkan alat yang lebih akurat yang dikenal dengan nama

automated fingerprint identification system dan live scan technology.

Selain itu dalam melaksanakan identifikasi orang/penjahat terdapat tiga sistem ilmiah yang saat ini berkembang, yaitu:

- a) Anthropometry
- b) Dactylography, dan
- c) Deoxyribo-nucleic-acid (DNA) typing

Menurut Prof. Koespramono Irsan bahwa” Bukti yang ditemukan oleh seorang ahli forensik dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Yang paling sederhana adalah apa yang dikenal dengan pengklasifikasian dalam:

1. Personal evidence misalnya dalam bentuk testimony/pernyataan pribadi seperti kesaksian atau keterangan yang diucapkan/diuraikan oleh saksi. Personal yang dibawakan oleh saksi, maupun ahli forensik itu sendi.
2. Physical evidence atau bukti fisik seperti sidik jari, pecahan kaca, peluru, tapak kaki/sepatu dan lainnya. Physical evidence bersifat obyektif, dan akan tetap seperti apa adanya sekalipun diperiksa oleh lain ahli forensik, walaupun kemudian kemungkinan ada aspek subyektifnya.¹⁷

Dalam mengidentifikasi sidik jari/gambar setiap jari-jari menggunakan berbagai macam rumus. Dibutuhkan pakar matematika yang handal dan komputer yang sangat canggih untuk menunjukkan gambar yang sama sekali tidak mengalami

¹⁷ Ibid

pengulangan dalam membedakan setiap sidik jari sehingga tidak terjadi kesalahan.

Diantara bermilyard-milyard sidik jari manusia dalam ribuan tahun tidak satupun orang yang mempunyai sidik jari yang sama dengan sidik jari dengan orang lain.

1.5.2 Tinjauan Tentang Sidik jari

1.5.2.1 Awal Terbentuknya Sidik Jari

Sidik jari adalah kulit pada telapak tangan dan kaki yang tertutup garis timbul kecil yang disebut rabung gesekan (Friction ridges). Sidik jari akan terbentuk dengan sempurna setelah janin berusia 13 minggu sejak alam kandungan, sidik jari telah terbentuk dengan sempurna. Satu guratan sidik jari biasanya tersusun antara 50-100 garis. Sedangkan satu jari tersusun dari ratusan hingga ribuan garis.

Sebagaimana disebutkan di atas, ilmu yang mempelajari sidik jari atau kulit telapak tangan disebut dermatoglyphs. Sesuai dengan namanya, derma artinya kulit, dan glyphs artinya garis-garis yang terukir. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang dermatoglyphs, secara otomatis kita akan ingat terhadap sidik jari, meskipun banyak garis-garis lain pada telapak tangan.

Uniknya, sidik jari tidak semata-mata tidak tersusun dari kulit luar, tetapi juga didorong oleh tumbuhnya tonjolan

daging yang berada di bawah kulit. Hal ini membuktikan bahwa guratan sidik jari terkait erat dengan unsur genetika. Oleh karena itu, hampir setiap guratan sidik jari setiap orang berbeda-beda. Bahkan, bayi kembar dalam satu kandungan pun tidak akan mempunyai sidik jari yang sama.¹⁸

Jika diperhatikan dengan seksama, tonjolan pada sidik jari tidak terlalu bersambungan, tetapi agak terputus, terpecah menjadi dua, sehingga mengesankan membentuk semacam kantong kecil seperti "danau". Bahkan, samar-samar terlihat seperti saling bersilangan. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda, minyak, dan asam amino. Garis rabung itu akan meninggalkan pola khas (bekas sidik jari) pada benda yang kita pegang. Inilah sebabnya, sidik jari bisa dijadikan alat pengenalan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup enam miliar orang, maka ada enam miliar pula jenis sidik jari yang ada dan belum ditemukan seorang pun yang mempunyai sidik jari yang sama dengan yang lainnya.¹⁹

1.5.2.2 Awal Penggunaan Sidik Jari

Pada zaman dulu juga dikenal istilah "ilmu perbintangan". Ilmu perbitangan (astrologi) merupakan prediksi sifat atau karakter manusia berdasarkan pada perhitungan posisi

¹⁸ Suyadi, *Rahasia Sidik Jari*, Flash Books, Jogjakarta, 2010, Edisi Pertama, H. 103.

¹⁹ Ibid h. 104.

bintang tertentu yang muncul disaat kelahiran orang tersebut. Di Eropa, sistem perhitungan seperti ini disebut dengan istilah zodiak. Zodiak adalah “ilmu” yang membagi manusia ke dalam kelompok-kelompok binatang.

Ilmu lain yang muncul pada waktu itu adalah klasifikasi sifat kepribadian manusia berdasarkan bentuk tubuh, raut wajah, dan bagian tubuh lain, seperti garis tangan. Sistem klasifikasi ini dikenal dengan istilah palmistry. Palmistry berusaha melihat potensi bahkan, masa depan seseorang dari garis tangannya. Jadi, hampir mirip dengan ramalan dari supranatural.

Dalam perkembangan selanjutnya, metode ini diadopsi kalangan militer untuk mengidentifikasi tindak kejahatan. Mereka mencari benda-benda yang sekiranya pernah disentuh oleh pelaku, untuk kemudian dianalisis bekas sidik jarinya. Melalui sidik jari inilah pelaku dapat ditangkap dengan mudah. Sebab, pemilik sidik jari tidak akan sama, sehingga lebih mudah menangkapnya.

Perkembangan mutakhir dari analisis sidik jari juga diadopsi oleh dunia bisnis. Mereka menggunakan analisis sidik jari untuk sidik jari karyawan sebuah perusahaan. Hanya dengan cara menempelkan ujung ibu jari pada mesin yang telah dirancang secara khusus, setiap karyawan dapat diketahui waktu kedatangan dan kepulangannya secara akurat. Sebab, alat

tersebut telah dikoneksikan dengan komputer sehingga otomatis merekap semua data.

Perkembangan paling mutakhir adalah dunia pendidikan yang turut mengadopsi tes analisis sidik jari. Dengan scanning seluruh sidik jari, anak akan mendapatkan informasi lengkap tentang dirinya. Bahkan, ia akan mendapatkan saran dari tim ahli, berupa jurusan maupun konsentrasi studi yang cocok dengannya.²⁰

1.5.2.3 Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya.²¹

Sidik jari (bahasa Inggris: fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari

²⁰ Ibid h. 105-106.

²¹ Adam Antonius, Mengungkap Rahasia Sidik Jari, <http://www.gallerydunia.com/2011/08/mengungkap-rahasia-sidik-jari.html>, diakses pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2012, jam 16.50

yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.²²

Karena keunikannya tersebut, sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensik). Makanya pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diclear up dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

1.5.2.4 Jenis-Jenis Sidik Jari

Secara umum, terdapat tiga pola atau bentuk sidik jari, yaitu busur (arch), sangkutan (loop), dan lingkaran (whorl). Ketiga bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa subbentuk subgroup yang berbeda-beda. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jari.

Jadi, secara umum, bentuk guratan sidik jari hanya ada tiga, dan ketiganya dibedakan oleh core dan delta. Selebihnya, dari ketiga bentuk pokok sidik jari tersebut, hanya sebatas varian dan kombinasi bentuk dasarnya. Jadi, jika di dunia ini hidup lebih dari enam miliar orang, pada dasarnya sidik jari mereka hanya terdiri dari tiga bentuk dasar itu saja. Selebihnya adalah varian dan kombinasi yang kemudian menjadi bentuk tersendiri.

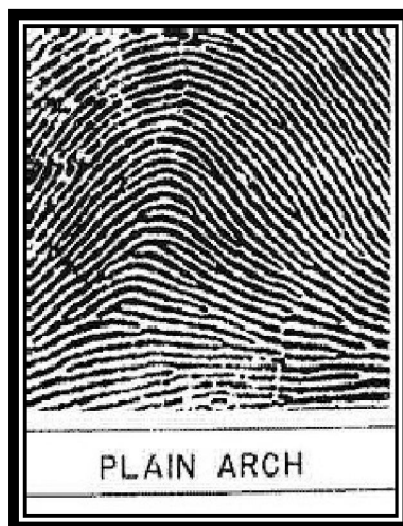
Mungkin anda akan bertanya, jika di dunia ini hidup dari enam miliar dan hanya ada tiga bentuk sidik jari, lantas apa bentuk sidik jari enam miliar lebih yang lain? Bukankah jika terdapat enam miliar orang, juga terdapat enam miliar sidik jari?

²² Bambang Pranata Sungkono, Dasatnya Sidik Jari, http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari, diakses pada hari sabtu, tanggal 27 Oktober 2012, jam 16.59

Tiga bentuk dasar hanya pengembangan varian dari tiga bentuk dasar sidik jari. Jadi, walaupun hanya ada tiga bentuk dasar sidik jari, variasinya bisa mencapai miliaran, sehingga tidak satupun sidik jari yang sama.²³

Sekedar contoh, setiap orang mungkin saja memiliki whorl, arch, atau loop di setiap ujung jari (sidik jari) yang berbeda. Pola-pola tersebut juga dapat ditemukan pada setiap ruas di tiap-tiap jari pada setiap tangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan mengenai ketiga bentuk dasar sidik jari tersebut.

a. Sidik Jari Berpola Arch



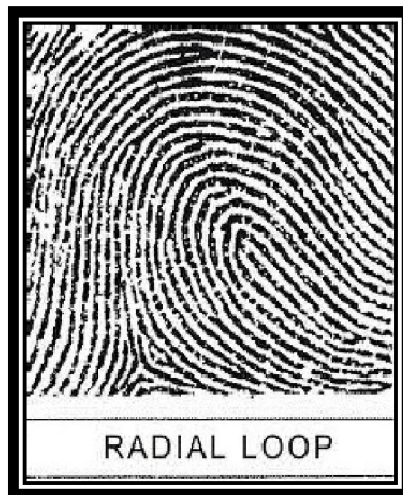
Gambar 1.1
Plain Arch

Pola sidik jari arch sebagai mana ditunjukkan pada gambar di atas adalah jenis sidik jari berbentuk garis datar bergelombang dengan variasi anak cabang dan ukuran yang tidak menentu. Pola sidik jari arch terbagi ke dalam dua bentuk, yakni flat arch dan tented arch.²⁴

²³ Ibid h. 108-109.

²⁴ Ibid h. 110.

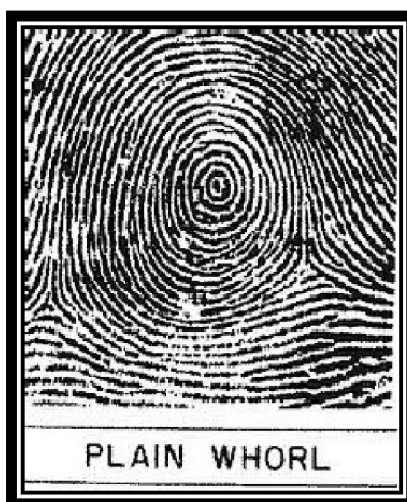
b. Sidik Jari Berpola Loop



Gambar 1.2
Radial Loop

Pola sidik jari berbentuk loop sebagai mana ditunjukkan pada gambar di atas adalah pola sidik jari dengan guratan kulit membentuk lengkungan loop. Pola sidik jari loop. Terdiri dari tiga bentuk, yakni common loop, double loop dan radial loop.²⁵

c. Sidik Jari Berpola Whorl



Gambar 1.3
Plain Whorl

²⁵ Ibid h. 112.

Sidik jari berpola whorl sebagai mana ditunjukkan gambar di atas adalah sidik jari dengan bentuk guratan menyerupai sepiral, bulls eye, atau double loop. Kata whorl sendiri berarti titik-titik menonjol dan kontras, serta bisa dilihat dengan mudah. Guratan sepiral dan bulls eye persis sebangun dalam interpretasinya, tetapi bulls eye memberikan sedikit lebih banyak pada fokus. Adapun pada bagian tangan, whorl terpusat pada daerah tertentu, sehingga seolah-olah menjadikannya sebuah wilayah fokus di dalam kehidupan subyek.²⁶

1.5.3 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Pengertian tindak pidana menurut pakar-pakar hukum adalah sebagai berikut:²⁷

1. Simons : adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana.

²⁶ Ibid h. 115.

²⁷ Jiwo Pangestu Agung, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, <http://jiwoagung.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-pembunuhan-berencana.html> diakses pada hari minggu, 28 Oktober 2012, 12.00 wib.

2. Sudarto : tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi.
3. Moeljatno: tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Van Hamel : Merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang- undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.²⁸

Jadi suatu tindak pidana adalah, perbuatan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat, atas suatu peristiwa pidana dan tentunya diperlukan norma hukum yang berupa sanksi, karena pada hakekatnya tujuan hukum ialah, menjaga keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

²⁸ Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : Rafika Aditama, 2001, hal 14.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.²⁹
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa

²⁹ Ibid

saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

1.5.3.2 Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai 2 sifat :³⁰

a. Formil:

Tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana).

b. Materil:

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang adalah timbulnya suatu akibat. (dengan timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.³¹

³⁰ Jiwo Pangestu Agung, Op. Cit.

³¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002 , hal 120.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

1.5.3.3 Pengertian Pembunuhan

Nyawa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani. Dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa. Dengan jiwa manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya, manusi memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Tidak pidana terhadap nyawa di sini, akibat yang timbul adalah hilangnya

nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air dan lain sebagainya. Cara-cara ini tidak dipersoalkan.

Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan. R. Soesilo (1988:240) mengatakan bahwa, tindak pidana ini dinamakan “kejahatan terhadap jiwa seseorang”.

Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja;
- b. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja;
- c. Tindak pidana terhadap tubuh.³²

1.5.3.4 Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja

1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (doodslag).

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338. Adapun unsur-

³² Kombes. Pol. Dr. Ismu. Gunadi W, S.H., CN., M.M. dan. Kompol. Dr. Yahman, S.H., M.H, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi pustaka raya, Jakarta, 2011, H. 15-16.

unsurnya, unsur obyektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subyektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak merumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, tetapi dalam timbul kemudian setelah beberapa saat setelah di rumah sakit. (H.A.K.Moch.Anwar,1994:88)

Untuk dapat dikatakan untuk menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam perbuatan ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagai anggota tubuh, tidak bersifat positif. (Tongat, 2003:5)

pada umumnya, seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.³³

2. Tindak Pidana pembunuhan Disertai Pembunuhan Lain

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini yang perlu diperhatikan yaitu:

Unsur obyektif, yaitu:

- a. Perbuatan pembunuhan bisa (doodslag);
- b. Perbuatan itu diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Unsur subyektif, yaitu:

perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk: mempersiapkan; mempermudah; jika tertangkap dapat

³³ Ibid h. 17.

melepaskan diri bersama kawan-kawan dari hukuman; menjamin barang yang didapatnya dengan melawan hak.

Perbedaan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini adalah: “perbuatan ini disertai, diikuti atau didahului dengan perbuatan lain”. Maksud disertai, diikuti atau didahului dengan perbuatan lain yaitu untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu. Ada hubungan kausal antara perbuatan lain yang dapat dihukum.³⁴

3. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan (moord). (R.Soesilo, 1988:240).

Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah: unsur obyektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain; perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subyektif yaitu: perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkanbdung dalam Pasal 340 KUHP mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang;

³⁴ Ibid h. 18.

- 2) Waktu untuk berfikir cukup sejak timbulnya niaat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu;
- 3) Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Pasal 340 KUHP memuat pula unsur “kesengajaan” hal tersebut mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letaknya dibelakang unsur “kesengajaan” tersebut harusnyalah dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur “kesengajaan”. (Hermin Hediati Koeswadi, 1984:39) patut dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur kesengajaan dalam arti luas. (Tongat, 2003:21).³⁵

1.5.3.5 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 340 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.³⁶

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 340 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana,

³⁵ Ibid h. 20.

³⁶ Jiwo Pangestu Agung, Op. Cit.

cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat :³⁷

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

1.5.3.6 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Dari pasal tersebut, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subyektif
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu

³⁷ Ibid

b. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.³⁸

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. pembentukan Pasal 340, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengatakan direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

³⁸ Manage Qolbu, Tindak Pidana Terhadap Nyawa, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-nyawa.html>, diakses hari Minggu , pada tanggal 28 Oktober 2012, 12.00 wib

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku.³⁹

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

³⁹ Ibid

Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pasal 340 adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan pidana di mana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi panutan perilaku setiap orang.⁴⁰

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran ruang lingkup tentang keadaan hukum ditempat tertentu dan pada saat ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

1.6.2 Sumber Data Atau Bahan Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Unifersitas Indonesia, Jakarta, 1984, Edisi Kedua hal, 252.

⁴¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003,Edisi Pertama, hal. 31.

1.6.3 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a. KUHP
 - b. KUHPA

1.6.4 Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴²

1.6.5 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.5 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

⁴² Ibid hlm 32.

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi atau tidak maupun berupa catatan.

Dalam hal ini penyusun akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur hukum, internet, KUHP, KUHPA.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan kanit identifikasi, ahli hukum pidana, hakim dan pengacara untuk memperoleh keterangan mengenai pertanggung jawaban pidana kasus pembunuhan berencana dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para korban.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Dalam artian menggambarkan suatu gejala di masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat pada proposal skripsi ini maka pertanggungjawaban sistematika terdiri atas empat bab, dan masing-masing bab terdiri sub-sub bab yang diantaranya sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan. Didalamnya memuat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua berisi kajian pustaka yang merupakan uraian teoritis tentang teori dasar yang digunakan sebagai analisa pemecahan hukum yang diteliti. Sub bab ketiga berisi metode penelitian yang berupa cara melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data, penarikan kesimpulan selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

Bab II, mengenai apa yang menjadi dasar dipakainya sidik jari sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana di

kepolisian resort Sidoarjo. Sub bab pertama yang mengenai sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan berencana di kepolisian resort Sidoarjo. Sub bab ke dua tentang dasar atau alasan penyidik di kepolisian resort Sidoarjo yang menjadikan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagai alat bukti utama.

Bab III, berisi factor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan berencana. Sub bab pertama mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan berencana di kepolisian resort Sidoarjo. Sub bab kedua mengenai upaya-upaya penanggulangan penghambat pelaksanaan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab IV, merupakan penutup bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini merupakan kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya yang kemudian akan dapat diperoleh suatu pendapat yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk saran.